

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan menjadi perhatian utama untuk Indonesia sebagai negara yang berkembang, kedua komponen ini dianggap sama pentingnya tetapi ketika untuk mewujudkan secara bersamaan sulit untuk tercapai apalagi hanya mementingkan satu pilihan pasti akan mengorbankan yang lainnya. Ekonomi suatu negara terkadang terjadi adanya kenaikan dan penurunan yang mana ini diakibatkan dari pembangunan ekonomi suatu negara, resiko yang sering terjadi yaitu sering menimbulkan adanya ketimpangan antara wilayah ataupun daerah. Ketimpangan sering terjadi di beberapa daerah terutama yang pembangunan ekonominya terkadang naik atau turun, pembangunan ekonomi di Indonesia juga masih belum stabil yang mengakibatkan ada beberapa daerah yang pertumbuhan ekonominya signifikan dan ada yang tidak signifikan.

Ketimpangan pendapatan sudah menjadi masalah yang terjadi di berbagai negara baik itu negara maju maupun negara berkembang, tetapi ada perbedaan diantara negara berkembang dan negara maju dalam menyelesaikan masalah ketimpangan pendapatan yaitu di lihat dari proporsi atau besar kecilnya suatu ketimpangan yang terjadi, kemudian dilihat dari solusi dari tingkat kesulitan yang dialami. Pendapatan relatif

dan distribusi pendapatan merupakan gambaran keadaan distribusi pendapatan di beberapa negara. Distribusi pendapatan relatif diartikan bahwasanya perbandingan jumlah pendapatan yang masuk ke berbagai golongan penerima pendapatan yang mana hal ini dibagi menjadi tiga golongan yaitu: penduduk yang berpendapatan tinggi sebesar 20%, penduduk yang berpendapatan menengah sebesar 40% dan penduduk yang berpendapatan rendah sebesar 40%. Kemudian untuk distribusi mutlak yaitu didapat dari presentase jumlah penduduk yang mana pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari itu (Sukirno, 2006).

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang mendapat dua masalah besar yaitu dalam ketimpangan pendapatan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi antara kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dan masyarakat yang berpendapatan tinggi kemudian di tambah dari tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di garis kemiskinan (BPS 2020). Masalah ketimpangan atau disparitas pendapatan menjadi masalah yang besar dan menjadi masalah penting yang harus di selesaikan. Pembangunan menjadi salah satu solusi untuk pemerataan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan yang melibatkan perubahan-perubahan pada tingkah laku sosial, struktur sosial, dan institusi sosial di samping pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1997).

Adapun dalam dalil Al-Qur'an yang makna kandungannya menjelaskan terkait pendadapatan, supaya harta tidak berputar hanya di

satu orang tertentu. Hal ini di jelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr Ayat 7 yaitu:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: Semua harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, yaitu untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin dan untuk musafir. Apapun yang diberikan Rasul kepadamu maka harus diterima, dan semua larangan bagimu maka harus ditinggalkan dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya (QS. Al-Hasyr Ayat 7).

Kemudian maka dari itu sangat diperlukan sekali penanganan terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, dalam menyelesaikan masalah dalam kesejahteraan ekonomi penduduk harus diikuti dengan perbaikan kualitas penduduk, yang salah satunya dapat dimulai dengan memperbaiki tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Masyarakat berpendapatan tinggi dan masyarakat berpendapatan rendah menjadi alasan terjadinya ketimpangan pendapatan, selain itu juga ketimpangan antar daerah adanya gap pembangunan baik itu di dalam ataupun antara daerah maju, berkembang dan terbelakang. Ketimpangan tidak selalu terjadi di kekayaan, tetapi juga di kesempatan akses pendidikan. Pendidikan jadi salah satu faktor penting dalam mendapatkan

ketentuan dalam tingkat upah dan memberikan kontribusi yang besar terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Karena ketika seseorang memiliki pendidikan yang tinggi maka akan tinggi juga pekerjaan yang dimiliki.

Kemudian selain pendidikan/pengetahuan, kesehatan juga menjadi salah satu indikator naik turunnya perekonomian, sesuai yang disampaikan oleh Mils dan Gilson dalam Hakimudin (2010) bahwasanya ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, sehingga dengan demikian Kesehatan pembahasan dalam kesejahteraan ekonomi. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam supaya kegiatan ekonomi penduduk dalam satu daerah bisa berjalan dengan produktif. Efektifitas menaikkan Indeks Pembangunan Manusia merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrument pembangunan.

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak bisa hanya bertumpu terhadap peningkatan ekonomi saja, tetapi sangat diperlukan pembangunan dari berbagai aspek (Ardiansyah dan Wiyaningsih, 2014) sehingga pembangunanpun bisa merata. Indikator utama keberhasilan dalam pembangunan yaitu laju penurunan jumlah penduduk miskin, maka dari itu ini menjadi salah satu kriteria utama dalam pemilihan sektor titik berat dalam pembangunan nasional yaitu efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Simatupang dan Derodrejo, 2003). Penurunan jumlah penduduk miskin dapat mengurangi

jumlah penduduk yang tidak bekerja, dan dapat mengurangi juga angka ketimpangan distribusi pendapatan (Rasio Indeks Gini).

Kemudian untuk mengetahui tingkat kesenjangan suatu daerah yaitu dengan melihat koefisien Rasio Gini (*Gini Ratio*). Koefisien Rasio Gini berada di antara 0 sampai 1 yang artinya jika koefisien Rasion Gini bernilai 0 maka pemerataan sempurna, akan tetapi sebaliknya jika nilainya 1 maka daerah tersebut tidak sempurna, selain itu Rasio Gini bisa menunjukkan ketidaksetaraan melalui alat analisis rasio pendapatan perkapita dan Produk Domestik Bruto. Untuk mendapatkan nilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah, harus membandingkan pendapatan riil daerah yang bersangkutan, dengan PDRB yang aman hal ini sebagai indikator yang dapat digunakan.

Dari semua yang di sampaikan oleh penulis di atas mengenai faktor terjadinya ketimpangan pendapatan di buktikan dengan adanya beberapa jurnal yang meneliti terkait permasalahan tersebut, sebagaimana yang di analisis Nadya dan Syfri (2019) meneliti tentang pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia dengan hasil semua variabel berpengaruh positif dan signifikan kecuali variabel pengangguran berpengaruh negatif.

Hindun, Soejoto dan Hariyati (2019) hasil dari penelitian ini yaitu dimana variabel pendidikan dan kemiskinan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan variabel pengangguran tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, tetapi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Falsabit dan Yusran (2019) dalam penelitiannya mengenai pengaruh keterbukaan ekonomi, pendidikan dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia bahwasanya variabel Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan Adapun hasil dari variabel yang lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Putra (2018) dalam penelitiannya yang berjudul analisis pengaruh TPAK Wanita, PDRB per kapita, IPM dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009-2018 dari hasil regresi penelitian ini dimulai dari variabel TPAK Wanita, IPM dan TPT berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi dalam variabel PDRB berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Pengaruh negatif ini disebabkan karena pendapatan atau PDRB Perkapita di Provinsi Kepulauan Riau tidak secara merata ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Windriyanti (2019) mengenai pengaruh PDRB per kapita, jumlah Penduduk, Inflasi dan Kebijakan Dana Desa terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Yogyakarta. Hasil yang didapatkan PDRB per kapita berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di daerah Yogyakarta. Kemudian variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan distribusi pedataan di daerah DI Yogyakarta dan variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di daerah DI Yogyakarta.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ayuk (2021) yaitu mengenai analisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah, bidang Kesehatan gender GAP dan pendapatan perkapita terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah 2017-2019, dari hasil (uji F) model terestimasi FEM dapat diketahui bahwa FEM eksis. Artinya, secara simultan (bersama-sama) variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Gender Gap dan Pendapatan per kapita berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, dari hasil uji validitas pengaruh (uji-t) bisa diketahui bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan bernilai positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan bernilai positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Maka dari itu dengan adanya permasalahan yang terjadi dan beberapa penilaian yang berbeda penulis melakukan penelitian mengenai **PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, PENDUDUK MISKIN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KESEHATAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN 33 PROVINSI DI INDONESIA PERIODE 2011-2020.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapat rumusan sebagai berikut:

1. Apakah variabel PDRB mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 33 Provinsi Indonesia periode 2011-2020?
2. Apakah variabel persentase jumlah Penduduk Miskin mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 33 Provinsi Indonesia periode 2011-2020?
3. Apakah variabel Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 33 Provinsi Indonesia periode 2011-2020?
4. Apakah variabel Kesehatan mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 33 Provinsi Indonesia periode 2011-2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka untuk tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel PDRB mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 33 Provinsi Indonesia periode 2011-2020?
2. Untuk mengetahui pengaruh persentase jumlah Penduduk Miskin mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 33 Provinsi Indonesia periode 2011-2020?

3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 33 Provinsi Indonesia periode 2011-2020?
4. Untuk mengetahui pengaruh Kesehatan mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 33 Provinsi Indonesia periode 2011-2020?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bidang teoritis

Penelitian ini bisa memberikan kontribusi di bidang ekonomi terutama masalah yang memengaruhi ketimpangan pendapatan sebagai penelitian terdahulu atau juga bisa jadi acuan yang digunakan untuk penelitian mendatang yang berhubungan dengan variabel atau objek yang sama.

2. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini bisa menjadi rujukan pada proses pembangunan di setiap daerah, serta bisa digunakan dalam mempertimbangkan dalam menentukan strategi dalam pembangunan ekonomi yang efektif.